



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

ruduct75@gmail.com

27 March 2026

DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN INKLUSIF DI INDONESIA

Abstrak

Makalah ini membahas dinamika kebijakan fiskal di Indonesia dalam kaitannya dengan upaya mendorong pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan inklusif tidak cukup dimaknai sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto, melainkan sebagai pertumbuhan yang mampu memperluas kesempatan kerja, menurunkan kemiskinan, meredakan ketimpangan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperkecil kesenjangan antardaerah. Dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data resmi, makalah ini menunjukkan bahwa APBN berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, alokasi, distribusi, dan transformasi. APBN 2025 dirancang dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," dengan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, dan defisit 2,53 persen terhadap PDB. Belanja negara diarahkan pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, dan transfer ke daerah. Pada saat yang sama, ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, gini ratio menurun menjadi 0,363, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2025 turun menjadi 4,85 persen, dan IPM meningkat menjadi 75,90. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan penting dalam menjaga daya beli, mendukung pelayanan dasar, dan memperluas akses ekonomi. Namun demikian, makalah ini juga menegaskan bahwa pertumbuhan inklusif masih menghadapi kendala struktural: ruang fiskal yang terbatas, penerimaan negara yang perlu

diperkuat, kualitas belanja yang belum merata, dominasi pekerjaan informal dan berproduktivitas rendah, serta tantangan ketepatan sasaran perlindungan sosial. Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal ke depan perlu menekankan reformasi penerimaan, penajaman targeting, penguatan belanja produktif, sinergi pusat-daerah, dan evaluasi hasil berbasis dampak sosial-ekonomi. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya menjadi alat menjaga stabilitas, tetapi juga mesin pemerataan kesempatan dan kesejahteraan. ([Kemenkeu Media](#))

Kata kunci: kebijakan fiskal, pertumbuhan inklusif, APBN, kemiskinan, ketimpangan, perlindungan sosial, Indonesia

1. Pendahuluan

Dalam teori ekonomi publik, kebijakan fiskal pada dasarnya adalah sarana negara untuk memengaruhi distribusi sumber daya, arah pembangunan, dan stabilitas ekonomi. Namun dalam praktik negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan fiskal memiliki fungsi yang lebih luas. Ia tidak hanya mengoreksi siklus ekonomi, tetapi juga menjadi mekanisme negara untuk menghadirkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan transfer antardaerah. Karena itu, ketika isu pertumbuhan inklusif mengemuka, pembicaraan tentang APBN menjadi sangat relevan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu otomatis memperkecil kesenjangan; sebaliknya, tanpa desain fiskal yang tepat, pertumbuhan dapat terkonsentrasi pada wilayah, sektor, dan kelompok sosial tertentu. Tema resmi kebijakan fiskal 2025 sendiri menegaskan orientasi ini, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” ([Kemenkeu Media](#))

Makna pertumbuhan inklusif dalam konteks Indonesia harus dibaca secara lebih substantif. Pertumbuhan dikatakan inklusif apabila manfaatnya terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat: kesempatan kerja bertambah,

akses pendidikan dan kesehatan membaik, rumah tangga miskin memperoleh perlindungan, ketimpangan menurun, dan daerah tidak tertinggal terlalu jauh dari pusat-pusat pertumbuhan. Data terbaru memberi sinyal positif namun sekaligus mengingatkan bahwa agenda tersebut belum selesai. Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen; persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen; gini ratio turun menjadi 0,363; tingkat pengangguran terbuka Agustus 2025 turun menjadi 4,85 persen; dan IPM Indonesia 2025 meningkat menjadi 75,90. Akan tetapi, masih ada 23,36 juta penduduk miskin, ketimpangan di wilayah perkotaan tetap lebih tinggi dibanding perdesaan, dan tantangan kualitas pekerjaan masih besar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Dunia juga menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil keluar ke status upper middle-income pada 2023, tetapi tantangan utama sekarang adalah mempercepat reformasi agar pertumbuhan dapat menciptakan pekerjaan yang lebih baik. Kajian mereka menyoroti bahwa banyak pekerjaan masih terkonsentrasi pada sektor jasa informal berproduktivitas rendah, sementara manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi belum cukup kuat menciptakan pekerjaan bermutu. Dengan demikian, inklusivitas tidak lagi dapat diukur hanya dengan penurunan kemiskinan absolut, tetapi juga dengan kualitas mobilitas sosial, produktivitas kerja, dan ketahanan kelas menengah. ([The World Bank](#))

Di sinilah kebijakan fiskal menjadi sentral. APBN bekerja sebagai shock absorber ketika ekonomi menghadapi tekanan global, sekaligus sebagai alat distribusi untuk menghubungkan pertumbuhan dengan kesejahteraan sosial. Dokumen APBN 2025 secara eksplisit menyatakan bahwa di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, APBN tetap diandalkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Rumusan ini penting, sebab ia menunjukkan bahwa negara memosisikan fiskal bukan sekadar pembukuannya, tetapi sebagai mesin intervensi pembangunan. ([Kemenkeu Media](#))

Makalah ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana dinamika kebijakan fiskal Indonesia dalam mendukung pertumbuhan inklusif, apa saja capaian yang telah terlihat, dan tantangan struktural apa yang masih harus dibenahi? Untuk menjawab pertanyaan itu, pembahasan disusun melalui uraian tentang kerangka konseptual pertumbuhan inklusif, postur APBN dan arah fiskal mutakhir, mekanisme transmisi fiskal terhadap kesejahteraan, evaluasi indikator sosial-ekonomi terbaru, serta agenda pembaruan kebijakan ke depan. Seluruh analisis didasarkan pada data resmi pemerintah Indonesia dan lembaga internasional yang relevan. ([Kemenkeu Media](#))

2. Pertumbuhan Inklusif dan Peran Kebijakan Fiskal

Secara konseptual, pertumbuhan inklusif berbeda dari pertumbuhan semata. Pertumbuhan biasa menekankan ekspansi output agregat, sedangkan pertumbuhan inklusif menekankan distribusi manfaat pertumbuhan tersebut. Dalam arti ini, pertumbuhan inklusif menuntut setidaknya lima hal: pertama, adanya kesempatan ekonomi yang lebih luas; kedua, akses terhadap layanan dasar yang merata; ketiga, perlindungan terhadap kelompok rentan; keempat, penurunan ketimpangan; dan kelima, penciptaan pekerjaan yang layak. Karena unsur-unsur itu berkaitan erat dengan pembiayaan publik, maka kebijakan fiskal secara alamiah menjadi instrumen yang paling langsung. Ia bekerja melalui penerimaan yang dikumpulkan negara, lalu dikembalikan dalam bentuk belanja, subsidi, transfer, dan investasi sosial. Temuan Bank Dunia bahwa peningkatan transfer fiskal turut menopang penurunan kemiskinan, namun kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan, memperlihatkan bahwa pertumbuhan inklusif memang sangat bergantung pada desain fiskal sekaligus transformasi struktural. ([The World Bank](#))

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal memiliki empat fungsi utama dalam pertumbuhan inklusif. Fungsi pertama adalah fungsi stabilisasi, yaitu menjaga permintaan agregat, daya beli, dan ketahanan ekonomi ketika terjadi tekanan eksternal. Fungsi kedua adalah alokasi, yakni memastikan

belanja negara diarahkan ke sektor-sektor yang menghasilkan manfaat sosial jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fungsi ketiga adalah distribusi, yaitu menyalurkan kembali sumber daya kepada kelompok yang lebih rentan melalui perlindungan sosial, subsidi yang tepat sasaran, dan transfer fiskal. Fungsi keempat adalah transformasi, yaitu mendorong perubahan struktur ekonomi melalui investasi publik, ketahanan pangan, hilirisasi, dan penguatan produktivitas. Dokumen APBN 2025 menegaskan keempat corak ini: kualitas belanja diperkuat, belanja modal diarahkan untuk transformasi ekonomi, subsidi dan perlindungan sosial direformasi agar lebih tepat sasaran, dan sinergi pusat-daerah diperkuat melalui implementasi UU HKPD. ([Kemenkeu Media](#))

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal juga harus menjawab masalah spasial. Indonesia bukan hanya ekonomi besar, tetapi juga ekonomi yang tersebar dalam kepulauan, dengan perbedaan kapasitas fiskal, akses pasar, kualitas SDM, dan infrastruktur yang tajam antardaerah. Karena itu, pertumbuhan tidak akan inklusif bila hanya terkonsentrasi di metropolitan atau koridor ekonomi tertentu. Transfer ke daerah, dana desa, belanja layanan dasar, dan pembiayaan infrastruktur konektivitas menjadi penting bukan hanya sebagai instrumen keuangan, melainkan sebagai jembatan integrasi ekonomi nasional. APBN 2025 mengalokasikan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun, dan Kementerian Keuangan menekankan bahwa TKD diarahkan untuk mempercepat konvergensi antardaerah dan mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. ([Kemenkeu Media](#))

Dengan demikian, teori fiskal untuk pertumbuhan inklusif tidak boleh dibatasi pada logika “besar kecilnya defisit.” Pertanyaan yang lebih penting ialah: untuk apa belanja digunakan, siapa yang menerima manfaatnya, seberapa tepat sasaran intervensi itu, dan apakah belanja tersebut benar-benar memperbaiki produktivitas serta mobilitas sosial? Dari sudut ini, disiplin fiskal tetap penting, tetapi kualitas fiskal jauh lebih menentukan. APBN yang sehat namun tidak berdampak luas pada masyarakat rentan bukanlah fiskal yang inklusif; sebaliknya, APBN yang ekspansif tetapi tidak

efisien juga tidak berkelanjutan. Maka, inti kebijakan fiskal inklusif terletak pada keseimbangan antara ekspansi, kehati-hatian, dan efektivitas. ([World Bank](#))

3. Postur dan Arah Kebijakan Fiskal Indonesia

Postur APBN 2025 menunjukkan upaya pemerintah menempatkan fiskal secara serempak sebagai instrumen pertumbuhan dan distribusi.

Pendapatan negara pada APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun atau 12,36 persen PDB, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun. Di sisi lain, belanja negara dialokasikan Rp3.621,3 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah Rp919,9 triliun. Target defisit ditetapkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih fiskal yang tetap ekspansif, tetapi masih berada dalam kerangka kehati-hatian karena tetap jauh di bawah batas legal 3 persen PDB.

([Kemenkeu Media](#))

Dari sisi arah kebijakan, APBN 2025 secara jelas menekankan penguatan kualitas belanja. Dalam dokumen resmi dijelaskan bahwa belanja negara diarahkan untuk efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja modal guna mendukung transformasi ekonomi, reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, serta peningkatan sinergi kebijakan pusat dan daerah. Ini merupakan pergeseran penting dari fiskal yang hanya berorientasi “serapan anggaran” menuju fiskal yang lebih berorientasi pada mutu keluaran dan dampak. Di sinilah dinamika fiskal Indonesia menjadi menarik: pemerintah tidak lagi sekadar menambah belanja, tetapi juga mencoba menata komposisinya.

([Kemenkeu Media](#))

Arah prioritas itu terlihat pada alokasi sektoral. Untuk APBN 2025, sektor pendidikan dialokasikan sekitar Rp724,3 triliun, perlindungan sosial Rp504,7 triliun, infrastruktur Rp400,3 triliun, dan anggaran kesehatan sekitar Rp218,48 triliun atau sekitar 6 persen dari total belanja negara. Selain itu, anggaran tematik juga diarahkan pada ketahanan pangan,

hilirisasi industri, dan pengarusutamaan gender. Komposisi ini menunjukkan bahwa desain fiskal Indonesia masih memberi tempat besar pada belanja sosial dan human capital, seraya tetap mempertahankan investasi infrastruktur dan produktivitas. ([Kementerian Keuangan](#))

Dinamika fiskal 2025 juga memperlihatkan penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan prioritas baru pemerintah. Dalam penilaian Bank Dunia terhadap perkembangan semester pertama 2025, defisit melebar karena pendapatan menurun sementara belanja diprioritaskan ulang ke program sosial seperti makan bergizi, perumahan, koperasi, stimulus, serta ketahanan energi dan pangan. Di satu sisi, langkah ini menopang konsumsi rumah tangga; di sisi lain, Bank Dunia mengingatkan bahwa pergeseran berlebihan ke belanja konsumtif dapat mengurangi ruang bagi investasi yang menopang pertumbuhan jangka panjang. Catatan ini penting karena pertumbuhan inklusif menuntut bukan hanya bantuan jangka pendek, tetapi juga investasi produktif yang menciptakan peluang ekonomi baru. ([The World Bank](#))

Jika dilihat dari realisasi sementara, APBN 2025 tetap berada dalam koridor terkendali. Publikasi APBN KiTa Q4 2025 mencatat bahwa defisit APBN 2025 terjaga dalam batas aman sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen PDB. Artinya, walaupun APBN berfungsi ekspansif dan harus mengakomodasi berbagai prioritas pembangunan, disiplin fiskal tetap dipertahankan. Fakta ini penting secara makro, sebab kredibilitas fiskal akan menentukan kemampuan pemerintah membiayai agenda inklusi di masa depan. Fiskal yang kehilangan kepercayaan pasar justru akan mempersempit ruang belanja sosial dan produktif. ([Kemenkeu Media](#))

Pada 2026, kesinambungan arah itu masih terlihat. APBN 2026 ditetapkan dengan belanja negara Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, dan target defisit 2,68 persen terhadap PDB. Pada akhir Januari 2026, defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen PDB, yang oleh Kementerian Keuangan dinilai masih sangat terkendali dan sesuai desain APBN. Ini menunjukkan bahwa dinamika fiskal Indonesia bergerak pada

pola “ekspansif namun pruden”: negara tetap aktif menopang ekonomi dan agenda sosial, tetapi menjaga defisit dalam batas aman. ([Kementerian Keuangan](#))

4. Saluran Kebijakan Fiskal Menuju Pertumbuhan Inklusif

4.1 Perlindungan sosial dan daya beli rumah tangga

Saluran paling langsung dari kebijakan fiskal menuju pertumbuhan inklusif adalah perlindungan sosial. Di negara dengan jumlah penduduk besar dan keragaman tingkat kesejahteraan seperti Indonesia, perlindungan sosial berfungsi ganda: melindungi konsumsi minimum rumah tangga miskin dan rentan, sekaligus mencegah guncangan ekonomi berubah menjadi krisis sosial. APBN 2025 mengalokasikan perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun. Pada tataran desain, langkah ini menunjukkan bahwa negara melihat pertumbuhan inklusif bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari kemampuan rumah tangga untuk bertahan dan berpartisipasi dalam ekonomi. ([Kementerian Keuangan](#))

Perlindungan sosial memiliki efek ekonomi yang lebih luas daripada sekadar bantuan. Ketika rumah tangga miskin memperoleh dukungan untuk pangan, pendidikan, kesehatan, atau perlindungan pendapatan, maka konsumsi dasar mereka lebih terjaga. Konsumsi ini kemudian menopang perekonomian lokal, khususnya perdagangan kecil, jasa, dan UMKM. Pada fase tekanan ekonomi, efek ini menjadi sangat penting. Karena itulah Bank Dunia menilai bahwa peningkatan transfer fiskal membantu penurunan kemiskinan, meskipun tantangan kualitas pekerjaan tetap ada. Dalam konteks Indonesia, pelajaran pentingnya adalah bahwa perlindungan sosial harus diposisikan sebagai investasi stabilitas sosial-ekonomi, bukan semata-mata beban anggaran. ([The World Bank](#))

Namun efektivitas perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan sasaran. Bank Dunia menekankan bahwa pembaruan basis data dan perluasan jangkauan perlindungan sosial, termasuk bagi pekerja paruh waktu dan informal,

sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Ini relevan bagi Indonesia karena struktur ketenagakerjaan masih ditandai oleh informalitas yang tinggi dan kerentanan kelas menengah bawah terhadap guncangan harga maupun pendapatan. Dengan kata lain, fiskal yang inklusif memerlukan sistem data sosial yang sama kuatnya dengan sistem anggarannya. ([World Bank](#))

4.2 Pendidikan dan kesehatan sebagai basis mobilitas sosial

Pertumbuhan inklusif tidak mungkin tercapai tanpa peningkatan kualitas modal manusia. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal yang serius pada inklusi harus menempatkan pendidikan dan kesehatan bukan sebagai pengeluaran rutin, melainkan sebagai investasi antargenerasi. APBN 2025 mengalokasikan sekitar Rp724,3 triliun untuk pendidikan dan Rp218,48 triliun untuk kesehatan. Pilihan ini menegaskan bahwa inklusivitas dalam jangka panjang bergantung pada kemampuan negara menurunkan hambatan sosial sejak dini: anak miskin harus bisa sekolah, keluarga rentan harus memperoleh layanan kesehatan, dan kualitas tenaga kerja harus membaik. ([Kementerian Keuangan](#))

Di bidang kesehatan, kebijakan fiskal memiliki implikasi langsung pada produktivitas. Anggaran kesehatan 2025 diarahkan untuk mewujudkan SDM yang sehat dan produktif serta mendukung transformasi sistem kesehatan. Belanja semacam ini menghasilkan efek ganda. Dalam jangka pendek, ia menurunkan kerentanan rumah tangga terhadap biaya kesehatan yang menghancurkan keuangan keluarga. Dalam jangka menengah dan panjang, ia meningkatkan kapasitas kerja, memperpanjang produktivitas, serta menurunkan kehilangan pendapatan akibat sakit. Karena itu, belanja kesehatan tidak boleh dipandang sebagai biaya konsumtif, melainkan sebagai fondasi ekonomi inklusif. ([Kemenkeu Media](#))

Sementara itu, kenaikan IPM Indonesia menjadi 75,90 pada 2025 menunjukkan bahwa investasi pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup telah memberi hasil. Walau IPM bukan semata-mata hasil APBN tahun berjalan, peningkatan ini memperlihatkan bahwa arah fiskal

yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan tetap relevan. Tantangannya ialah memastikan bahwa belanja besar itu benar-benar berkorelasi dengan mutu hasil belajar, kesehatan preventif, penurunan stunting, dan kesiapan kerja generasi muda. Inklusivitas menuntut hasil, bukan hanya alokasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

4.3 Infrastruktur dan transfer ke daerah

Infrastruktur adalah prasyarat penting bagi pertumbuhan yang lebih merata. Jalan, pelabuhan, irigasi, konektivitas digital, layanan air, dan transportasi mengurangi biaya ekonomi dan memperluas pasar. Di Indonesia, belanja infrastruktur juga merupakan instrumen pemerataan spasial, sebab ketimpangan biaya logistik dan kualitas pelayanan publik antardaerah sangat memengaruhi kesempatan ekonomi warga. APBN 2025 mengalokasikan sekitar Rp400,3 triliun untuk infrastruktur dan Rp919,9 triliun untuk Transfer ke Daerah. Kombinasi ini menunjukkan bahwa inklusivitas dipahami tidak hanya sebagai distribusi pendapatan, tetapi juga distribusi kapasitas pembangunan. ([Kementerian Keuangan](#))

Transfer ke Daerah memiliki arti strategis karena banyak layanan dasar justru dilaksanakan di tingkat lokal. Sekolah, puskesmas, jalan kabupaten, irigasi kecil, dan layanan administrasi publik sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Karena itu, transfer bukan sekadar “bagi hasil” keuangan, tetapi arsitektur pemerataan nasional. Dokumen APBN 2025 menyebutkan bahwa TKD diarahkan untuk mempercepat konvergensi antardaerah, meningkatkan investasi daerah, dan memperbaiki mekanisme penyaluran agar kondisi fiskal pemerintah daerah tetap terjaga. Ini berarti pertumbuhan inklusif di Indonesia mensyaratkan hubungan fiskal pusat-daerah yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga sinkron dalam sasaran. ([Kemenkeu Media](#))

Akan tetapi, besarnya TKD tidak otomatis menjamin pemerataan. Permasalahan klasiknya adalah variasi kualitas belanja di tingkat daerah. Sebagian daerah mampu mengubah transfer menjadi infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik yang lebih baik; sebagian lain masih

terjebak pada belanja rutin dan rendahnya kapasitas implementasi. Inilah sebabnya kebijakan fiskal inklusif memerlukan bukan hanya transfer dana, tetapi juga reformasi kelembagaan, penguatan kapasitas perencanaan, dan ukuran kinerja yang berbasis hasil. Tanpa itu, fiskal daerah cenderung bersifat administratif, bukan transformatif. ([Kemenkeu Media](#))

4.4 Kebijakan perpajakan dan belanja perpajakan

Pertumbuhan inklusif tidak mungkin dibiayai tanpa basis penerimaan yang sehat. Karena itu, diskusi tentang fiskal inklusif harus selalu memadukan dua sisi: kualitas belanja dan kekuatan penerimaan. APBN 2025 menargetkan penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun atau 10,24 persen terhadap PDB. Pemerintah juga menegaskan bahwa optimalisasi perpajakan perlu dilakukan sambil tetap menjaga fungsi strategisnya dalam redistribusi, pengendalian eksternalitas, dan pemberian insentif terarah bagi kegiatan ekonomi prioritas. Rumusan ini penting karena memperlihatkan bahwa pajak bukan hanya instrumen mengumpulkan uang, tetapi juga alat membentuk perilaku ekonomi dan keadilan distribusi. ([Kemenkeu Media](#))

Di sisi lain, pada 2025 pemerintah juga memberikan belanja perpajakan yang sangat besar, yakni diperkirakan mencapai Rp530,3 triliun. Mayoritasnya dinikmati sektor rumah tangga dan berbagai aktivitas ekonomi yang memperoleh fasilitas perpajakan. Secara teoritis, belanja perpajakan dapat menjadi alat yang efektif untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi, atau memperkuat sektor tertentu. Namun secara praktis, belanja perpajakan harus dievaluasi setara dengan belanja langsung: siapa yang menikmati, apa dampaknya, dan apakah manfaat sosial-ekonominya sepadan dengan potensi penerimaan yang dilepas negara. Bagi agenda inklusi, insentif fiskal yang tidak tepat justru dapat mempersempit ruang bagi belanja sosial yang lebih progresif. ([Kementerian Keuangan](#))

Tantangan penerimaan semakin terasa ketika harga komoditas menurun dan kebutuhan belanja tetap tinggi. Kemenkeu mencatat bahwa

pendapatan negara 2025 menghadapi tantangan berat di tengah turunnya harga komoditas dan gejolak ekonomi global. Pada saat yang sama, Bank Dunia mengingatkan bahwa pembayaran bunga dan amortisasi utang mencapai puncaknya pada 2025, sehingga reformasi penerimaan menjadi makin penting agar ruang fiskal tidak menyempit dan belanja yang mendukung pertumbuhan tidak terdesak oleh kewajiban pembayaran utang. Dalam bahasa yang lebih sederhana, negara tidak bisa terus berharap pada belanja inklusif tanpa memperdalam fondasi penerimaannya. ([Kemenkeu Media](#))

5. Evaluasi Hasil: Sejauh Mana Fiskal Mendukung Inklusi?

Dari sisi pertumbuhan, capaian 2025 relatif solid. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, sedikit lebih tinggi dibanding 2024 yang tumbuh 5,03 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan global, konsumsi domestik, investasi, dan ekspor masih mampu menopang aktivitas ekonomi. Jika dikaitkan dengan kebijakan fiskal, hasil tersebut mengindikasikan bahwa APBN tetap efektif sebagai penyangga permintaan agregat dan stabilitas. Namun pertanyaan inklusifnya bukan hanya "berapa tinggi pertumbuhan," melainkan "siapa yang memperoleh manfaatnya." ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada indikator kemiskinan, terlihat kemajuan yang cukup berarti. Persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen pada September 2025, dengan jumlah penduduk miskin 23,36 juta orang. Di perkotaan angkanya 6,60 persen, sedangkan di perdesaan 10,72 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan intervensi fiskal tertentu telah membantu memperbaiki kesejahteraan kelompok bawah. Namun perbedaan kota-desa yang masih besar juga mengingatkan bahwa inklusi belum merata. Secara struktural, rumah tangga perdesaan masih menghadapi kerentanan yang lebih tinggi terhadap pendapatan rendah, produktivitas terbatas, dan kualitas layanan dasar yang belum setara. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada indikator ketimpangan, perkembangan juga membaik. Gini ratio Indonesia September 2025 tercatat 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Berdasarkan ukuran Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah mencapai 19,28 persen, yang berada pada kategori ketimpangan sedang. Ini menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan memang telah sedikit lebih menyebar. Namun distribusi tersebut juga memberi pesan bahwa kelompok bawah masih belum menikmati porsi yang benar-benar besar dalam total pengeluaran nasional. Artinya, fiskal berhasil membantu meredakan ketimpangan, tetapi belum cukup untuk mengubah struktur distribusi secara mendasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari perspektif pasar kerja, indikator kuantitatif juga bergerak positif. TPT Agustus 2025 turun menjadi 4,85 persen, dengan jumlah penduduk bekerja naik menjadi 146,54 juta orang. Akan tetapi, indikator ini harus dibaca secara hati-hati. Bank Dunia mengingatkan bahwa masalah utama Indonesia bukan hanya jumlah pekerjaan, melainkan kualitas pekerjaan. Banyak pekerjaan masih berada pada sektor informal dan produktivitas rendah, sehingga walau pengangguran menurun, keamanan ekonomi rumah tangga belum sepenuhnya kuat. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan fiskal inklusif tidak boleh berhenti pada penciptaan pekerjaan jangka pendek, tetapi harus mendorong transformasi menuju pekerjaan yang lebih stabil, formal, dan produktif. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada indikator pembangunan manusia, kenaikan IPM Indonesia menjadi 75,90 pada 2025 memberi sinyal positif tentang kualitas hidup. Ini menunjukkan bahwa perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup terus berlangsung. Dalam kerangka fiskal, peningkatan IPM memperkuat argumen bahwa belanja sosial dan human capital bukan sekadar pengeluaran normatif, melainkan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Namun, sebagaimana lazim dalam pembangunan manusia, hasil agregat nasional masih menyembunyikan variasi antardaerah dan antarkelompok sosial. Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya

menaikkan angka nasional, tetapi memastikan bahwa kemajuan tersebut menjangkau daerah tertinggal dan kelompok marjinal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Stabilitas harga juga menjadi komponen penting inklusivitas. Inflasi IHK 2025 sebesar 2,92 persen, berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia $2,5 \pm 1$ persen. Stabilitas inflasi ini penting karena kelompok miskin paling rentan terhadap kenaikan harga bahan pokok dan biaya transportasi. Namun tekanan harga tetap perlu diwaspadai. Pada Februari 2026 inflasi y-on-y mencapai 4,76 persen, sementara Bank Indonesia mencatat inflasi volatile food 4,64 persen pada Maret 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan fiskal dalam melindungi daya beli tidak bisa dilepaskan dari koordinasi dengan kebijakan moneter, pasokan pangan, dan distribusi. Dalam pertumbuhan inklusif, stabilitas harga adalah bentuk perlindungan sosial yang paling mendasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

6. Tantangan Struktural Kebijakan Fiskal Inklusif

Tantangan pertama adalah ruang fiskal. Walaupun defisit 2025 dan awal 2026 tetap terkendali, kebutuhan belanja untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, perumahan, dan infrastruktur terus meningkat. Pada saat yang sama, penerimaan negara menghadapi tekanan dari moderasi harga komoditas, dinamika perdagangan, dan kebutuhan menjaga daya beli. Bank Dunia memperingatkan bahwa pembayaran utang dan bunga mencapai puncaknya pada 2025, sehingga reformasi mobilisasi pendapatan menjadi kunci agar belanja produktif tidak terdesak. Ini berarti inklusivitas tidak hanya bergantung pada niat politik, tetapi juga pada kapasitas fiskal riil negara. ([World Bank](#))

Tantangan kedua adalah kualitas targeting. Besarnya anggaran perlindungan sosial tidak otomatis berarti seluruh kelompok rentan terlindungi dengan baik. Struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih ditandai oleh informalitas tinggi membuat banyak rumah tangga berada pada wilayah abu-abu: tidak masuk miskin ekstrem, tetapi sangat rentan jatuh miskin ketika terkena guncangan. Bank Dunia menekankan perlunya

pembaruan basis data dan perluasan perlindungan, terutama bagi pekerja informal dan paruh waktu. Ini adalah tantangan administratif sekaligus politik, sebab data sosial yang usang akan menghasilkan kebijakan fiskal yang mahal tetapi kurang tepat. ([World Bank](#))

Tantangan ketiga adalah trade-off antara belanja jangka pendek dan investasi jangka panjang. Dalam tahun-tahun tekanan sosial-ekonomi, pemerintah cenderung mengutamakan program dengan dampak cepat terhadap konsumsi dan daya beli. Kebijakan semacam ini penting untuk meredam gejolak, tetapi jika berlarut-larut dapat mengurangi ruang bagi investasi yang menciptakan kapasitas ekonomi masa depan, seperti pendidikan bermutu, infrastruktur produktif, riset, dan transformasi industri. Bank Dunia telah memberi peringatan bahwa reprioritisasi belanja ke program sosial tertentu memang menopang konsumsi, tetapi berisiko mengurangi investasi yang menopang pertumbuhan mendatang. Dalam perspektif ini, pertumbuhan inklusif menuntut keseimbangan antara proteksi hari ini dan produktivitas besok. ([The World Bank](#))

Tantangan keempat ialah ketimpangan kapasitas antardaerah. Transfer ke daerah sangat besar, tetapi dampaknya pada kualitas layanan publik tidak selalu sebanding. Masalahnya terletak pada perencanaan, tata kelola, kualitas birokrasi, dan kemampuan daerah mengeksekusi program berbasis hasil. Akibatnya, daerah dengan kapasitas lebih baik cenderung lebih mampu mengonversi transfer menjadi kemajuan sosial-ekonomi, sementara daerah yang lemah tertinggal lebih jauh. Dengan kata lain, fiskal pusat dapat menyediakan sumber daya, tetapi inklusivitas tetap membutuhkan institusi daerah yang kuat. ([Kemenkeu Media](#))

Tantangan kelima adalah kualitas pekerjaan. Data ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan jumlah pekerja dan turunnya pengangguran, tetapi Bank Dunia menekankan bahwa banyak pekerjaan masih terkonsentrasi pada sektor informal berproduktivitas rendah. Ini penting, sebab rumah tangga dengan pekerjaan yang tidak stabil akan tetap rentan walau angka pengangguran nasional membaik. Maka kebijakan fiskal yang

inklusif harus lebih aktif mendorong sektor-sektor pencipta pekerjaan bermutu, melalui belanja produktif, dukungan investasi, konektivitas, reformasi logistik, dan insentif yang benar-benar mengarah pada kegiatan padat karya bernilai tambah lebih tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

7. Arah Kebijakan Fiskal ke Depan

Pertama, reformasi penerimaan harus menjadi prioritas utama. Negara memerlukan basis penerimaan yang lebih kuat agar tidak terus-menerus berada dalam dilema antara perluasan program sosial dan keterbatasan ruang fiskal. Optimalisasi perpajakan tidak cukup hanya melalui kenaikan tarif; yang lebih penting adalah perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, penguatan administrasi, dan evaluasi menyeluruh atas berbagai insentif. Dalam kerangka inklusi, reformasi penerimaan juga harus adil: kelompok dan aktivitas dengan kapasitas ekonomi lebih tinggi harus memikul kontribusi lebih besar, sementara kebijakan pajak bagi kelompok bawah tidak memperburuk daya beli. ([Kemenkeu Media](#))

Kedua, kualitas belanja harus menjadi kata kunci. Fokus kebijakan fiskal semestinya bergeser dari "berapa terserap" menjadi "apa yang berubah." Setiap rupiah untuk perlindungan sosial harus dinilai dari dampaknya pada kemiskinan dan kerentanan; setiap rupiah untuk pendidikan dari mutu belajar dan kesiapan kerja; setiap rupiah untuk kesehatan dari pencegahan penyakit, produktivitas, dan pengurangan beban biaya keluarga; dan setiap rupiah untuk infrastruktur dari penurunan biaya logistik atau peningkatan akses ekonomi. Tanpa budaya evaluasi hasil, fiskal mudah terjebak menjadi besar tetapi dangkal. ([Kemenkeu Media](#))

Ketiga, sinergi pusat-daerah harus diperdalam. Transfer ke daerah yang besar seharusnya diikuti kontrak kinerja yang lebih nyata, sistem pengukuran hasil yang lebih ketat, dan dukungan teknis bagi daerah yang kapasitasnya lemah. Pertumbuhan inklusif Indonesia pada akhirnya adalah hasil kumulatif dari ribuan keputusan fiskal lokal: kualitas sekolah daerah, daya jangkauan puskesmas, jalan produksi desa, bantuan sosial lokal, dan kemudahan usaha di kabupaten/kota. Maka, reformasi fiskal daerah harus

dipahami sebagai bagian dari strategi nasional, bukan agenda administratif belaka. ([Kemenkeu Media](#))

Keempat, desain perlindungan sosial perlu lebih adaptif terhadap struktur ekonomi baru. Di tengah digitalisasi, gig economy, dan tingginya informalitas, banyak rumah tangga berada di luar kategori miskin resmi tetapi tetap rapuh. Karena itu, perlindungan sosial perlu lebih dinamis, berbasis data mutakhir, dan mampu menjangkau kelompok rentan baru. Ini penting agar kebijakan fiskal tidak sekadar mengurangi kemiskinan kronis, tetapi juga mencegah kemiskinan baru yang lahir dari ketidakpastian kerja dan biaya hidup. ([World Bank](#))

Kelima, belanja produktif harus dikaitkan lebih erat dengan penciptaan pekerjaan bermutu. Inklusi tidak akan tahan lama bila terlalu bergantung pada transfer. Transfer penting untuk perlindungan, tetapi mobilitas sosial jangka panjang hanya dapat tumbuh dari produktivitas dan pekerjaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, belanja infrastruktur, pendidikan vokasi, kesehatan kerja, digitalisasi layanan publik, ketahanan pangan, dan dukungan UMKM harus dirancang dalam satu kerangka besar: memperbesar peluang naik kelas bagi rumah tangga Indonesia. Di sinilah fiskal bertemu dengan strategi pembangunan nasional. ([Kementerian Keuangan](#))

8. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa dinamika kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan dua kecenderungan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, APBN tetap digunakan sebagai instrumen stabilisasi yang menjaga daya beli, menopang pertumbuhan, dan meredam tekanan ekonomi. Di sisi lain, APBN juga diarahkan sebagai instrumen distribusi dan transformasi melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan transfer ke daerah. Postur APBN 2025 dan arah APBN 2026 menunjukkan bahwa negara berusaha mempertahankan keseimbangan antara ekspansi dan kehati-hatian. ([Kemenkeu Media](#))

Indikator sosial-ekonomi terbaru menunjukkan bahwa strategi tersebut menghasilkan kemajuan yang nyata. Pertumbuhan 2025 mencapai 5,11 persen, kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, gini ratio turun menjadi 0,363, pengangguran terbuka turun menjadi 4,85 persen, dan IPM naik menjadi 75,90. Capaian-capaian ini penting dan menunjukkan bahwa fiskal tetap relevan sebagai pilar inklusi. Namun pada saat yang sama, masih terdapat pekerjaan rumah besar: ruang fiskal yang terbatas, kebutuhan reformasi penerimaan, perlunya targetting yang lebih presisi, kualitas pekerjaan yang belum memadai, serta kesenjangan kapasitas pembangunan antardaerah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dengan demikian, pertumbuhan inklusif di Indonesia tidak dapat diserahkan hanya pada mekanisme pasar atau pertumbuhan agregat. Ia memerlukan kebijakan fiskal yang cerdas, progresif, pruden, dan terukur dampaknya. Tugas besar ke depan bukan sekadar memperbesar APBN, melainkan membuat APBN semakin efektif dalam memperluas kesempatan, mengurangi kerentanan, dan menaikkan kualitas kehidupan warga negara. Dalam pengertian inilah kebijakan fiskal bukan sekadar angka-angka dalam dokumen negara, melainkan wujud konkret kehadiran negara dalam pembangunan yang berkeadilan. ([Kemenkeu Media](#))

Glosarium

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR.

Belanja perpajakan

Potensi penerimaan pajak yang tidak dipungut karena adanya fasilitas, pembebasan, atau insentif perpajakan.

Defisit fiskal

Kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran.

Gini ratio

Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan; semakin mendekati 1 berarti semakin timpang.

IPM

Indeks Pembangunan Manusia, indikator komposit yang mencerminkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Kebijakan fiskal

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara untuk memengaruhi perekonomian.

Perlindungan sosial

Serangkaian program negara untuk melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan, kerentanan, atau kehilangan penghasilan.

Pertumbuhan inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya tersebar luas, memperluas kesempatan, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan.

Ruang fiskal

Kemampuan pemerintah untuk menambah atau mengalihkan belanja tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.

Shock absorber

Peran APBN sebagai peredam guncangan ekonomi agar dampaknya terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat dikendalikan.

TKD

Transfer ke Daerah, yaitu alokasi dana dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka, indikator persentase penganggur terhadap total angkatan kerja.

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,02.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen, rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, January 5). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Desember 2025 sebesar 2,92 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, January 6). *Inflasi IHK 2025 terjaga dalam sasaran.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, March 18). *BI-Rate tetap 4,75%.* ([Bank Indonesia](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025.* ([Kemenkeu Media](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, September 19). *DPR sahkan UU APBN Tahun Anggaran 2025, Menkeu: APBN 2025 didesain untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.* ([Kementerian Keuangan](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, September 29). *Target Pendapatan APBN 2025 naik, belanja negara untuk prioritas nasional.* ([Kementerian Keuangan](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, July 18). *Investasi kesehatan pemerintah kebut eliminasi TBC di Indonesia.* ([Media Keuangan](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, December 31). *Kerja Keras APBN 2025 untuk Indonesia.* ([Kemenkeu Media](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, January 9). *Insentif perpajakan dukung daya beli masyarakat dan perekonomian.* ([Kementerian Keuangan](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, February 23). *Kinerja APBN Januari 2026 solid.* ([Kementerian Keuangan](#))

World Bank. (2025, October). *Indonesia Macro Poverty Outlook.* ([The World Bank](#))

World Bank. (2025, December). *Indonesia Economic Prospects: Macro presentation.* ([The World Bank](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Mendukung
Pertumbuhan Inklusif di Indonesia*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 27 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c65f87-5844-83a0-8f24-9695bb399cee>